

PEDOMAN PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN

2020

PERWAL NOMOR 64 BD 2020/NO 64, 16 HLM

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEDOMAN PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN DI KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Kota Tasikmalaya bagi Pemerintah Daerah, Penduduk Daerah, BPJS Kesehatan dan para pemangku kepentingan bidang kesehatan di Kota Tasikmalaya.
 - Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : Perda Kota Tsm No. 10 Tahun 2019; Perwal Kota Tsm No. 46 Tahun 2017; Permendagri No. 64 Tahun 2020; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 101 Tahun 2012; Perpres No. 82 Tahun 2018; Permensos No. 5 Tahun 2016; Permensos No. 28 Tahun 2017; Permensos No. 1 Tahun 2019; Permensos No. 5 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2020; PMK No. 78/PMK.02/2020; Pergub Jabar No. 62 Tahun 2015; Perda Kota Tsm No. 5 Tahun 2016; Perda Kota Tsm No. 7 Tahun 2016; Perda Kota Tsm No. 10 Tahun 2019; Perwa No. 40 Tahun 2016; Perwal Kota Tsm No. 54 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup mengatur hal-hal sebagai berikut: program jaminan kesehatan; penduduk PBPU dan BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; peran serta masyarakat; pembiayaan; dan ketentuan peralihan.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Desember 2020.
 - Anggaran Jaminan Kesehatan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan dapat digunakan untuk pembayaran klaim pelayanan, baik pada tahun berkenaan maupun pelayanan tahun sebelumnya yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan layak bayar oleh tim verifikasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.